

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Moderasi Beragama**

Sejarah Kementerian Agama, bernama Departemen Agama setelah ada kebijakan Jepang kurang lebih tiga setengah tahun (1942-1945) didirikan Kantor Urusan Agama (Shumubu) dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Kementrian Agama didirikan sejak tanggal 3 Januari 1946 hasil dari permintaan partai politik Muslim. Pelaksanaannya Kementrian Agama terdapat batasan jaminan kebebasan beragama. Era kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin, moderasi beragama diartikan sudut pandang dan perbuatan sikap adil dan yang menerapkan posisi tengah, bersikap adil dan tidak melampaui dengan pemahaman sudut pandang, tingkah laku menerapkan posisi tengah, bertindak adil, serta tidak ekstrem pemahaman dan praktik beragama. Kementrian Agama mencari solusi agar pembaharuan dalam kepercayaan salah satu bagian sudut pandang untuk mengagendakan pembangunan nasional, untuk membangun sumber daya manusia.

Moderasi beragama mempunyai latar belakang pemerintahan semakin familiar dengan penguasa, negara, dunia akademis, politik, ahli agama untuk mendiskusikan pembaharuan kepercayaan. Pembaharuan kepercayaan adalah sudut pandang diimplementasikan dari tingkah laku dan ada mengaplikasikan ke masyarakat dengan dasar akidah kepercayaan. Membangkitkan keinginan nilai yang memprioritaskan kemanusiaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, (*Jakarta : Moderasi Beragama, 2019*), (1) hal 162.

Untuk bangsa Indonesia ada keanekaragaman baik suku, etnis dan lainnya tidak ada yang menyamai didunia. Ada lebih dari 100 atau lebih dari 1000 insan mempunyai suku yang tidak sama, bahasa yang tidak sama, suatu Ketuhanan didalam daerah yang tidak sama. Untuk itu ada banyak persoalan yang harus diselesaikan mulai dari perpecahan satu dengan yang lainnya

### **1. Pengertian Moderasi Beragama**

Moderasi beragama adalah salah satu cara memahami dan mengamalkan suatu ajaran agama secara selaras serta berlaku adil, supaya bisa terhindar dari perilaku ekstrem berlebihan dalam penerapan sehari-hari. Tujuan dari moderasi beragama adalah mencari jalan tengah. Organisasi keagamaan tertentu menyebut diri mereka ultra konservatif. Ekstremnya adalah mengorbankan gagasan yang berdasarkan ajaran agama, mendewakan akal, dan mengabaikan kesakralan agama. Karena mereka sadar akan toleransi, mungkin disebut sebagai kaum liberal ekstrem. Harus ada moderasi konstan terhadap pihak lain. Dengan demikian, moderasi beragama adalah cara pandang sikap dan tindakan keagamaannya mengambil sikap moderat, konsisten memperlakukan agama secara adil, dan menghindari ekstremisme. Untuk menjaga keutuhan negara, Kementerian Agama berupaya menumbuhkan moderasi beragama. Tujuan dari moderasi beragama adalah menjaga cita-cita dan kesatuan kelompok agama. memahami pokok-pokok ajaran agama sesuai dengan pedoman moderasi beragama. Sejarah Kementerian Agama, bernama Departemen Agama setelah ada kebijakan Jepang. Kementrian agama berdiri sejak tanggal 3

Januari 1946 hasil dari desakan partai politik Muslim. Praktiknya Kementerian Agama terdapat batasan jaminan kebebasan beragama. Era kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin, moderasi beragama diartikan cara pandang, perilaku menerapkan posisi tengah, bertindak adil, serta tidak ekstrem pemahaman dan praktik beragama. Kementerian Agama mencari solusi agar moderasi beragama salah satu bagian cara pandang merencanakan untuk pembangunan nasional, membangun sumber daya manusia. Aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak lepas nilai-nilai agama, umumnya masyarakat Indonesia termasuk sangat religius. Meski bukan Negara agama khususnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama berusaha menanamkan nilai luhur terkandung berbagai agama, menjadi motivasi inspirasi dalam membentuk karakter berdasarkan falsafah Pancasila. Pemerintah terdapat visi membangun fisik dan mental berlandaskan pengetahuan agama secara bersama. Internalisasi nilai agama memperkuat komitmen, bukan menggerogotinya, nilai ditanamkan bersifat nirkekerasan, mampu menerima perbedaan, inklusif, toleran serta saling menghargai keragaman.

## **2. Nilai-nilai Moderasi Beragama**

- a. Nilai moderasi beragama terdapat komitmen kebangsaan yang lebih mementingkan pendekatan melalui tindakan dan praktik. Untuk itu komitmen kebangsaan memperbolehkan yang dicantumkan seperti prinsip berbangsa dan konstitusi UUD 1945.
- b. Nilai moderasi dalam toleransi saling mengacu pada sikap dan saling memberikan batasan tentang menerima perbedaan tidak menjadikan

halangan bagi masyarakat. Toleransi antar agama bisa dilihat dari relasi antar tokoh agama maupun pemeluk agama dalam berdialog membahas kerjasama serta saling interaksi dengan lainnya, misal membahas pendirian rumah ibadah.

- c. Nilai moderasi dalam mencegah tindakan kekerasan mengatasnamakan agama dan menjadikan agama sebagai bahan politik baik kekerasan fisik, pikiran maupun verbal. Kekerasan atau radikalisme itu muncul atas perilaku menurut pandangan tidak sesuai dengan keinginannya, ada beberapa kategori keadilan yaitu sosial, politik, ekonomi, sehingga terbentuklah jaringan terorisme mengatasnamakan agama. Justru hal tersebut membuat semakin terancam dan membuat cara pandang orang lain memandang agama islam selalu dikaitkan dengan isu teroris.
- d. Nilai moderasi dalam akomodatif kearifan kebudayaan atau kearifan lokal memberikan pengetahuan mampu menerima praktik atas agama kebudayaan dan tradisi lokal. Jangan sampai ada kelompok tidak akomodatif akan menimbulkan saling menyalah pahamkan masalah mengotori agama yang murni satu sama lain. Pandangan orang semakin akomodatif yaitu memahami agama sudah moderat tetapi tetap dibuktikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nganjuk.

#### **B. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk.**

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Nganjuk adalah forum dibentuk oleh pemerintah sehingga memberikan fasilitas yang memiliki

tujuan untuk memperdayakan masyarakat melalui peran dalam menjalankan tugas. Mengadakan pertemuan dengan tokoh agama dan saling mengadakan kegiatan bersama untuk membentuk kemajuan di Kabupaten Nganjuk. Forum juga bertindak sendiri dan sebagai penasehat. Forum tersebut dibentuk masyarakat dan pemerintah memberikan fasilitas untuk menciptakan dan memperdayakan umat beragama. Konsep membangun itu menjadi salah satu konflik antar umat beragama. Tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pemerintah ikut bersatu dalam membangun kerukunan dan mencari sebuah solusi agar dapat dikendalikan dan keadaan berjalan sesuai realita menuju kondusif. Sebelumnya Forum bernama Kerukunan Umat Beragama (KUB) ada di Kabupaten Nganjuk.

Akhirnya pemerintah menetapkan KUB menjadi FKUB diartikan Forum Komunitas Umat Beragama didalamnya membahas kerukunan umat beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sering mengisi dan diundang untuk sosialisasi dengan lembaga lain. Pandangan masyarakat sosiologis adanya faktor pembentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui pendekatan sosiologis sakral, dan rasa berbangsa satu dan kebhinekaan. Tujuan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Berbagai konflik antar umat beragama ada kaitannya konflik maupun persoalan dari etnik, ekonomi, supaya tidak adanya persaingan.<sup>2</sup>

### **C. Teori Interaksi Sosial**

George Simmel atau disebut Simmel memberikan penjelasan sosiologi berfokus pada konsep utama berbentuk sosiologi dikalangan umum sampai paling

---

<sup>2</sup> M. Mulyana, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan Di Jawa Barat", Jurnal Studi Agama-agama Dan Lintas Budaya. Vol. 3,2. 2017, hal. 132.

spesifik. Istilahnya menunjukkan totalitas, sehingga memiliki hubungan sosial, tidak hanya tingkatan dan keberagaman, tapi akan mengenal pengetahuan lengkap yang disebut masyarakat. Simmel berusaha keras memisahkan dua kategori yaitu sosiologi dan psikologi sebatas hanya perlakuan ilmiah terhadap data psikis, lalu otomatis memiliki data psikologis sesuai realitas studi yang terdapat ilmiah ilmu sosial, yang dianggap memiliki konsep berbeda. Dari struktur spesifik didalamnya terdapat sosio-kultural dihubungkan lagi dengan berbagai interaksi sosial yang sesuai dengan pernyataan psikologis. Untuk itu sosiologi harus mampu membatasi diri dari hal bermakna psikologis, sosiologi harus mampu melampaui pemikiran psikologis melalui abstraksinya sendiri. Dari keterkaitan antara ide-ide mendasar dalam sosiologi Simmel, hubungan antara teori Simmel dan realitas sosial. Ada empat lapisan konsep dasar. Asumsi-asumsi yang merupakan aspek psikologis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan konsepsi makro. Yang kedua lebih luas dan menyoroti isu-isu komponen sosial berkaitan dengan interaksi antar pribadi. Inti konsepsi sosial budaya adalah tiga gagasan yaitu jiwa, ruh, dan substansi, terikat pada struktur dan perubahan ruh. Prinsip-prinsip metafisik keberadaan individu dan sosial disatukan oleh tatanan keempat, yang bergabung dengan tatanan pertama dan ketiga.

Pertama ada faktor psikologis yang perlu dipertimbangkan ketika mempelajari sosiologi murni. Digabungkan untuk menciptakan sebuah pertemuan. Idenya adalah tingkat mikro, dengan jenis individu dan interaksi yang<sup>3</sup> membedakan banyak jenis interaksi. Sosiologi yang berkaitan dengan artefak sosio-kultural dari sejarah manusia merupakan komponen kedua. Komponen

---

<sup>3</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi Untuk Universitas* (Bandung : PT Refika Aditama: 2017), hal 151.

ketiga dari pengertian filsafat sosiologi adalah sudut pandang yang terdiri dari gagasan-gagasan pokok (hukum) dan nasib manusia. Untuk mengatasi masalah interrelasi ada tiga komponen tingkatan mengenai realitas sosial, sehingga Simmel memiliki tujuan pendekatan dialektik yang memiliki ajaran seperti Max tetapi memiliki tujuan berbeda. Metode Simmel yang bertujuan untuk menyatukan fakta dan nilai, menolak konsep yang beragam dan memisahkannya fenomena sosial, serta memusatkan waktu dari masa lalu ke masa depan dengan tetap mewaspadaikan konflik dan kontradiksi. Simmel berusaha menghidupkan gagasannya melalui metode (berpikir) dialektis dan menghubungkannya dengan gagasan dualisme, yaitu gagasan filosofis yang menganut kontradiksi dan konflik serta memiliki dua prinsip dan berlawanan. Hubungan yang bersifat timbal balik sosial yang dinamis, seperti hubungan antara individu atau antara individu dengan masyarakat, disebut dengan interaksi sosial.

George Simmel merupakan pemikir sosiologi yang menyumbangkan gagasan mengenai etnisitas, ditingkatkan yang lebih makro. Teori Simmel mampu menghubungkan etnik yang memfokuskan tiga bahasan yaitu etnisitas sebagai *sociation* (proses sosial), sifat dasar dari interaksi sosial (etnik), (tipe sosial); menurunnya etnisitas soal perbedaan sosial, (pengembangan pola). Simmel juga mempunyai ciri khas yaitu menganalisis interaksi melihat bentuk yang diartikan melalui gambaran dan pola umum interaksi terjadi baik dilingkungan masyarakat maupun kelompok etnik dan isi dapat diartikan sebagai individu berkualitas baik psikologis, biologis menimbulkan terjadinya tindakan sosial. Simmel tidak menjelaskan banyak tentang arti isi karena jika dijelaskan akan sulit melihat isi dari interaksi. Hanya ada satu yaitu bentuk interaksi bisa di lihat secara langsung

oleh masyarakat. Dari sifat dasar interaksi sosial Simmel hanya menjelaskan peran individu yang sedang interaksi dalam kelompok atau kelompok dengan lainnya.

Simmel juga membahas orang asing “stranger” antara individu yang isekitar kelompok dan melakukan interaksi dengan kelompok tersebut. Simmel menjelaskan kelompok etnis memiliki aera kekuasaan yang memiliki nilai dan norma yang berlaku, yang dapat mempengaruhi individu dalam melakukan tindakan sosial. Kemudian Simmel juga membahas konflik. Berbeda dengan pandangan para pemikir melihat konflik berupa ancamandapat merusak kelompok. Simmel cenderung melihat konflik sebagai media membangun dan mempertahankan interaksi kelompok. Bahasan ini Simmel melihat isi interaksi sehingga terciptalah peranan. Simmel mempunyai tiga fungsi konflik dari sistem sosial, berikut penjelasannya :

1. Tingkatan semakin rendah terhadap kekerasan konflik yang terjadi.
2. Tingkatan semakin besar kekerasan konflik dan lamanya konflik.
3. Tingkatan semakin lama akan terjadinya konflik, semakin lama koalisi yang terjadi terkait dengan kelompok.





